

Analisis terhadap Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Gratis (Studi Deskriptif di Madrasah Aliyah Karya Madani Cipeundeuy Bandung Barat)

Analysis of Financing Management Free School Education
(Descriptive Study at Madrasah Aliyah Karya Madani Cipeundeuy West Bandung)

¹Wulan Nurul Azizah, ²Erhamwilda, ³Fitroh Hayati

^{1,2,3}*Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹nurulazizahwulan@gmail.com*

Abstract. Madrasah Aliyah Karya Madani is one of the free schools, where all students are not required to pay tuition fees in the hope that students can still get education without being hindered by the cost. The purpose of this study is to know the planning, implementation, evaluation and inhibiting factors and support the financing of free education in Madrasah Aliyah Karya Madani. The research method used is descriptive method with qualitative approach. The result of this research is planning of funding of education at Madrasah Aliyah Karya Madani same with financing planning in other school which refer to RAPBS / M, activity keep running even though no fund. The sources of Madrasah Aliyah financing are BOS, infak from the community and poor student assistance for private students. The strategy by Madrasah Aliyah Karya Madani to raise funds is to promote madrasah through da'wah because the foundation leader is DAI. Implementation of financing in accordance with applicable procedures, which refers to RAPBS / M. Evaluation is done in the form of supervision conducted on budget, infrastructure, cash and income and expenditure plans. Supervision is done at the beginning of the school year, during the event and the end of the school year. The financing constraint factor when the BOS funds have not gone down. Supporting factors of financing is the foundation always supports financing, BOS funds and infak from the community.

Keywords : education preparation, free school

Abstrak. Madrasah Aliyah Karya Madani merupakan salah satu sekolah gratis, dimana seluruh siswa tidak diwajibkan untuk membayar biaya pendidikan dengan harapan para siswa tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa terhalang oleh biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan faktor penghambat dan pendukung pembiayaan pendidikan sekolah gratis di Madrasah Aliyah Karya Madani. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Karya Madani sama dengan perencanaan pembiayaan di sekolah lain yaitu mengacu pada RAPBS/M, kegiatan tetap berjalan meskipun tidak ada dana. Sumber pembiayaan Madrasah Aliyah Karya madani yaitu BOS, infak dari masyarakat dan bantuan siswa miskin untuk pribadi siswa. Strategi yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Karya Madani untuk mencari dana yaitu mempromosikan madrasah lewat dakwah karena pembina yayasan merupakan seorang DAI. Pelaksanaan pembiayaan mengalir sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu mengacu pada RAPBS/M. Evaluasi yang dilakukan berupa pengawasan yang dilakukan terhadap anggaran, sarana prasarana, kas dan rencana pendapatan dan pengeluaran. Pewangasan dilakukan pada awal tahun ajaran, saat kegiatan berlangsung dan akhir tahun ajaran. Faktor penghambat pembiayaan ketika dana BOS belum turun. Faktor pendukung pembiayaan yaitu yayasan selalu mendukung dalam pembiayaan, adanya dana BOS dan infak dari masyarakat.

Kata Kunci : Pembiayaan Pendidikan, Sekolah Gratis

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia mempunyai 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah digulirkan pemerintah dalam PP No. 19 Tahun 2005 agar tercapainya pendidikan yang diharapkan, salah satunya yaitu standar pembiayaan pendidikan.

Dalam pencapaian tujuan pendidikan standar pembiayaan memiliki peran yang sangat penting. Yang masuk dalam kategori delapan standar pendidikan pemerintah. Mahalnya biaya pendidikan menjadi salah satu penyebab anak tidak bisa mengenyam pendidikan, sehingga kebanyakan orang tua di daerah pedesaan beranggapan bahwa lebih baik meneteskan peluh diladang daripada duduk seharian di bangku sekolah.

Dalam mewujudkan tujuan nasional wajib bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan bangsa Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Dalam merealisasikan program wajib belajar banyak lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan, salah satunya yaitu MA Karya Madani yang merupakan salah satu sekolah yang gratis, dimana Madrasah Aliyah Karya Madani tidak mewajibkan kepada seluruh siswa untuk membayar biaya pendidikan dengan harapan para siswa tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa terhalang oleh biaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: **“Analisis Terhadap Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Gratis” (Studi Deskriptif Di Madrasah Aliyah Karya Madani Cipeundeuy Bandung Barat).**

Tujuan Penelitian

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, faktor penghambat dan pendukung pembiayaan pendidikan sekolah gratis.

B. Landasan Teori

Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Gratis

Harsono (2007: 9) berpendapat bahwa biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Pengeluaran yang tidak memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dapat disebut sebagai pemborosan, atau pengeluaran yang mestinya dapat dicegah.

Manajemen pembiayaan adalah suatu aktivitas pengelolaan biaya agar dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, pengambilan keputusan dan kontrol. Dengan demikian, kegiatan dapat dilakukan secara maksimal, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan baik itu lembaga yang bersifat profit maupun nonprofit (Mulyono, 2016 : 87).

Dalam konsep pembiayaan pendidikan sedikitnya ada tiga pertanyaan yang terkait didalamnya. Seperti dikemukakan oleh Thomas John (1985 : 20) dalam Darmawan (2015 : 23) yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, dari mana sumbernya, dan untuk apa dibelanjakan serta siapa yang membelanjakan. Hal itu merupakan manajemen bisnis lembaga pendidikan, dimana manajemen didalamnya mencakup perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Menurut Mustari (2015 : 164) Adapun asas pengelolaan keuangan sekolah dapat diuraikan sebagai berikut :”keuangan sekolah dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.”

Fungsi manajemen pembiayaan pendidikan yang dijalankan oleh masing-masing sekolah atau madrasah meliputi perencanaan keuangan yang berupa penyusunan anggaran (*budgeting*) terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (APBS/M). Ruang lingkup pelaksanaan pembiayaan pendidikan

meliputi pembukuan (*accounting*) yang merupakan pembukuan terhadap pelaksanaan terhadap pembiayaan yang dilaksanakan untuk proses pendidikan. Adapun ruang lingkup terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan (*auditing*) merupakan pemeriksaan terhadap pendapatan dan pengeluaran serta penilaian pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Fungsi manajemen pembiayaan salah satunya yaitu menyangkut tentang merencanakan uang yang akan dialokasikan untuk hal apa, dalam hal ini bertujuan untuk memajukan mutu pendidikan kedepannya. Dalam penyusunan perencanaan pembiayaan yang terdapat disekolah harus melibatkan unsur pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Mulyono (2010 : 165) bahwa dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau *accounting*. Pembukuan merupakan pusat informasi keuangan yang akan disusun dalam bentuk laporan. Undang- undang nomor 28 tahun 2007 mendefinisikan pembukuan yaitu proses mencatat data dan informasi keuangan.

Menurut Fattah (2004 : 47) Sebagian besar penerimaan atau pendapatan biaya pendidikan selama ini berasal dari orang tua siswa yang berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), sedangkan untuk pendidikan dasar sembilan tahun sejak 2005 sebagian besar pendapatan atau penerimaan biaya operasional pendidikan ditunjang oleh pemerintah.

Menurut Fattah (2004 : 49) pengeluaran biaya pendidikan biasanya berupa Biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung berupa biaya yang mempengaruhi proses produksi, pada hal ini Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), sedangkan biaya tidak langsung berupa biaya yang secara tidak langsung masuk pada proses pendidikan, namun berpengaruh terhadap proses pendidikan yang sedang berjalan.

Menurut Mustari (2015 : 198) pada tahapan evaluasi , kepala sekolah wajib menyampaikan laporan dibidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Dari tahapan evaluasi ini muncullah tahapan auditing. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Strategi menggalang dana adalah tulang punggung kegiatan menggalang dana yang dilakukan. Perlu memberikan perhatian penuh sejak dari awal pada setiap langkah yang diambil untuk menggalang dana, agar segalanya berjalan lancar. Oleh karena itu, maka harus merencanakan strategi sebagai berikut: 1) menentukan kebutuhan, 2) mengidentifikasi sumber daya, 3) menilai peluang, 4) mengidentifikasi hambatan, 5) merumuskan strategi, 6) menguji, evaluasi dan kontrol (Norton, 2002:57).

Sekolah gratis bermakna bahwa peserta didik tidak membayar biaya pendidikan yang dibutuhkan sekolah. Yang di maksud sekolah gratis yaitu peserta didik bisa sekolah tanpa kewajiban membayar apapun baik untuk biaya investasi maupun biaya operasi sekolah (*Storada.blogspot.co.id, Jumat, 14/04/2017*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Peneliti mendapatkan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, faktor penghambat dan faktor pendukung pembiayaan pendidikan sekolah gratis.

Kegiatan perencanaan pembiayaan di Madrasah Aliyah Karya Madani sama dengan perencanaan-perencanaan pembiayaan di sekolah lainnya yaitu mengacu pada RAPBS/M. Perencanaan pembiayaan di Madrasah Aliyah Karya Madani dilakukan dengan rapat kerja yang dilaksanakan di awal tahun ajaran untuk merancang anggaran biaya. Dengan melibatkan ketua yayasan, komite madrasah, bendahara yayasan dan dewan guru walaupun pada akhirnya yang mengambil kebijakan dan memutuskan yaitu pihak yayasan dan bendahara yayasan.

Madrasah Aliyah Karya Madani mempunyai tekad untuk tidak menghasilkan suatu materi sehingga ada dana atau pun tidak ada dana, kegiatan yang sudah direncanakan harus berjalan. Misalkan dalam perencanaan harus beli sesuatu ternyata dana tidak ada, maka pihak sekolah lebih berinisiatif dengan cara memanfaatkan sesuatu yang ada misalkan dengan menggunakan kertas bekas. Pada akhirnya semua kegiatan bisa berjalan dan tidak terpaku pada biaya karena guru-guru di Madrasah Aliyah Karya Madani bertekad untuk berjihad fisabilillah untuk madrasah.

Sumber pembiayaan Madrasah Aliyah Karya madani yaitu dana dari pemerintah yaitu BOS, bantuan siswa miskin untuk pribadi siswa masing-masing dan dari Yayasan Karya Madani.

Adapun kebijakan lain yang di tetapkan oleh Madrasah Aliyah Karya madani yaitu pada awal masuk sekolah, pihak sekolah menyampaikan kepada orang tua siswa perihal biaya yang harus dimiliki oleh madrasah kemudian menawarkan kepada orang tua siswa siapa yang ingin membantu dalam pembiayaan untuk madrasah tapi sifatnya tidak wajib yang dinamakan infak. Pihak sekolah pun tidak memaksa karena berharap ingin meringankan beban orang tua dalam pembiayaan makanya sekolah tidak memungut spp dari siswa.

Strategi Madrasah Aliyah Karya Madani dalam mencari dana yaitu dengan cara berdakwah, karena pembina Yayasan Karya Madani seorang DAI maka disela berceramah beliau menginformasikan juga tentang adanya Madrasah Aliyah Karya Madani. Banyak para jamaah yang berkunjung ke Madrasah Aliyah Karya Madani dan menyalurkan infaq ke madrasah. Selain para jamaah yang pernah berkunjung ke Madrasah Aliyah Karya Madani yaitu mantan menteri Feri Mursyidan Baldan, Sekda Provinsi Jawa Barat, ketua PP Persis, para penyuluh agama dan masih banyak yang lainnya. Salah satu yang menjadi daya tarik Madrasah Aliyah Karya Madani yaitu Madrasah Aliyah Karya Madani sering dijadikan tempat pengajian majlis ta'lim.

Setiap tahun Madrasah Aliyah Karya Madani mempunyai program yang dapat menarik perhatian masyarakat, contohnya pada bulan Mei 2017 Madrasah Aliyah Karya Madani mengadakan program mungghah bungah 5 yang dihadiri oleh 650 peserta termasuk didalamnya santri, orang tua santri dan kaum dhuafa.

Pelaksanaan pembiayaan disekolah Madrasah Aliyah Karya Madani mengalir sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Dalam melaksanakan penerimaan keuangan Madrasah Aliyah Karya Madani mengadakan pembukuan harian dan tahunan yang berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang ditentukan oleh pihak yayasan supaya penerimaan dan pengeluaran biaya dilakukan secara jelas.

Pengeluaran keuangan biasanya digunakan untuk penghonoran, biaya operasional, listrik, ATK, menggaji guru dan karyawan, pemeliharaan gedung, kebersihan, alat bantu mengajar, dan pendukung kelancaran kegiatan pembelajaran lainnya yang termasuk dalam anggaran rutin (DIK). Mengenai proses pengeluaran atau langkah-langkah pengeluaran dana di Madrasah Aliyah Karya Madani adalah setiap kebutuhan madrasah yang membutuhkan pengeluaran terhadap dana madrasah harus melalui bendahara yayasan.

Evaluasi ini berupa pengawasan, Pengawasan dilakukan oleh kepala pimpinan Madrasah Aliyah Karya Madani dan pengurus yayasan dengan memantau terhadap pelaksanaan manajemen keuangan madrasah ini, Pengawasan ini dilaksanakan pada awal tahun pelajaran, saat kegiatan berlangsung, dan pada akhir tahun sekaligus untuk merancang tahun berikutnya

Faktor penghambat pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Karya Madani yaitu ketika dana BOS belum turun. Faktor pendukung pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Karya Madani yaitu Pembina Yayasan Karya Madani yang selalu *all out* atau mendukung dalam pembiayaan, ketika ada kekurangan dalam pembiayaan maka yayasan menutupi kekurangan biaya dimana biaya tersebut dihasilkan dari sumbangan berbagai pihak.

Pembahasan

Kegiatan perencanaan pembiayaan di Madrasah Aliyah Karya Madani yaitu mengacu pada RAPBS/M. yaitu dengan melakukan rapat kerja yang dilaksanakan di sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan yaitu awal tahun ajaran untuk merancang anggaran biaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyono (2010 : 164) bahwa *“manajemen pembiayaan pendidikan tidak terlepas dari penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS). Landasan dasar dalam pembuatan RAPBS/M meliputi sumber pendapatan dan pengeluaran”*.

Dalam merencanakan pembiayaan, Madrasah Aliyah Karya Madani melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua yayasan, komite madrasah, bendahara dan dewan guru walaupun pada akhirnya yang mengambil kebijakan dan memutuskan yaitu pihak yayasan dan bendahara yayasan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyono (2010) bahwa *penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dilaksanakan dengan melibatkan beberapa unsur, diantaranya (1) kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, (2) orang tua murid dalam wadah komite sekolah, (3) Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, dan (4) Pemerintah Kota/Kabupaten setempat*.

Sumber pembiayaan pendidikan sekolah gratis Madrasah Aliyah Karya Madani yaitu dana dari pemerintah yaitu BOS, bantuan siswa miskin untuk pribadi siswa masing-masing dan dari Yayasan Karya Madani. Hal ini sesuai dengan pendapat Fattah (2004 : 47) bahwa *“sebagian besar penerimaan atau pendapatan biaya pendidikan selama ini berasal dari orang tua siswa yang berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), sedangkan untuk pendidikan dasar sembilan tahun sejak 2005 sebagian besar pendapatan atau penerimaan biaya operasional pendidikan ditunjang oleh pemerintah”*.

Pengeluaran keuangan di Madrasah Aliyah Karya Madani biasanya digunakan untuk menggaji guru dan karyawan, pemeliharaan gedung, kebersihan, alat bantu mengajar, dan pendukung kelancaran kegiatan pembelajaran lainnya yang. Hal ini sebagaimana pendapat Fattah (2004 : 49) bahwa *“pengeluaran biaya pendidikan biasanya berupa Biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung berupa biaya yang mempengaruhi proses produksi, pada hal ini Kegiatan Belajar Mengajar (KBM),*

sedangkan biaya tidak langsung berupa biaya yang secara tidak langsung masuk pada proses pendidikan, namun berpengaruh terhadap proses pendidikan yang sedang berjalan”.

Evaluasi ini berupa pengawasan, Pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah dengan memantau terhadap pelaksanaan manajemen keuangan madrasah di madrasah ini. Pengawasan pembiayaan di Madrasah Aliyah Karya Madani dilaksanakan pada awal tahun pelajaran, saat kegiatan berlangsung, dan pada akhir tahun sekaligus untuk merancang tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mustari (2015 : 198) pada tahapan evaluasi bahwa *“kepala sekolah wajib menyampaikan laporan dibidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester”.*

Hambatan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Karya Madani yaitu ketika dana BOS belum turun, hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh Hanifah (2016) bahwa *“faktor penghambat pembiayaan yaitu proses pencairan dana yang tidak dapat langsung diambil dan digunakan pada saat membutuhkan, dana terlebih pada kebutuhan-kebutuhan pembiayaan yang bersifat insidental”.*

Faktor pendukung pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Karya Madani yaitu Pembina Yayasan Karya Madani yang selalu *all out* atau mendukung dalam pembiayaan, ketika ada kekurangan dalam pembiayaan maka yayasan menutupi kekurangan biaya dimana biaya tersebut dihasilkan dari sumbangan berbagai pihak, adanya dana BOS dari pemerintah, infak dari masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Hanifah (2016) bahwa

“faktor pendukung pembiayaan yaitu memupuk kerjasama yang baik antara sekolah dengan yayasan, adanya dana yang memadai dari pemerintah maupun dari sumber yang lainnya”.

D. Kesimpulan

Perencanaan pembiayaan di Madrasah Aliyah Karya Madani mengacu pada RAPBS. Dengan melibatkan ketua yayasan, komite madrasah, bendahara yayasan dan dewan guru. Madrasah Aliyah Karya Madani mempunyai tekad untuk tidak menghasilkan suatu materi sehingga ada dana atau pun tidak ada dana, kegiatan yang sudah direncanakan harus berjalan. Sumber pembiayaan Madrasah Aliyah Karya madani yaitu dana dari pemerintah yaitu BOS, bantuan siswa miskin untuk pribadi siswa masing-masing dan dari Yayasan Karya Madani. Strategi Madrasah Aliyah Karya Madani dalam mencari dana yaitu lewat berdakwah.

Pelaksanaan pembiayaan yang terdapat disekolah mengalir sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu mengacu pada RAPBS.

Evaluasi yang dilakukan Madrasah Aliyah Karya Madani berupa pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh kepala pimpinan Madrasah Aliyah Karya Madani dengan memantau terhadap pelaksanaan manajemen keuangan madrasah di madrasah. Pengawasan ini dilaksanakan pada awal tahun ajaran, saat kegiatan berlangsung, dan pada akhir tahun sekaligus untuk merancang tahun berikutnya

Faktor penghambat pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Karya Madani yaitu ketika dana BOS belum turun, faktor pendukung pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Karya Madani yaitu Pembina Yayasan Karya Madani yang selalu *all out* atau mendukung dalam pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Darmawan, Deni. (2015). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- E-book: Michael Norton, *Menggalang Dana: Penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-Negara Selatan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002) hlm. 56-57.
- Fattah, Nanang. (2004). *Ekonomi Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harsono. (2007). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- _____. (2016). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Mustari, M. (2015). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

